



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, January 2025

Pages : 2654–2658

Relasi Agama dan Negara dalam Bingkai NKRI

Muhammad Rizqi Afandi, Muhammad Falah Reyzer

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2992>

How to Cite this Article

APA : Rizqi Afandi, M., & Falah Reyzer, M. . (2025). Relasi Agama dan Negara dalam Bingkai NKRI. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 2654 – 2658.
<https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2992>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9 773032 710001 9 773032 601002

Relasi Agama dan Negara dalam Bingkai NKRI

Muhammad Rizqi Afandi¹, Muhammad Falah Reyzer²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2}

*Email: rizqikeran26@gmail.com ; reyzermuhammadfalah@gmail.com

Diterima: 26-01-2025

| Disetujui: 27-01-2025

| Diterbitkan: 28-01-2025

ABSTRACT;

The relationship between religion and state in the context of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) is an issue that continues to be relevant and dynamic. NKRI is based on Pancasila, which provides space for religious diversity while emphasizing the principles of unity and tolerance. This study aims to analyze the relationship between religion and state within the framework of Pancasila, with a focus on legal, political, and social implications. The method used is a literature review with a qualitative approach. The results of the study indicate that the success of the relationship between religion and state in Indonesia depends on the balance between the implementation of religious values and the principles of an inclusive legal state. In addition, challenges such as the politicization of religion and the potential for conflict between religious communities need to be addressed through dialogue and strengthening national awareness. Thus, the integration of religious values and the principles of NKRI can create sustainable social harmony.

Keywords: religion, state, Pancasila, NKRI, tolerance, law, politics.

ABSTRAK

Relasi antara agama dan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan isu yang terus relevan dan dinamis. NKRI didasarkan pada Pancasila, yang memberikan ruang bagi keberagaman agama sekaligus menegaskan prinsip-prinsip persatuan dan toleransi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara agama dan negara dalam bingkai Pancasila, dengan fokus pada implikasi hukum, politik, dan sosial. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan relasi agama dan negara di Indonesia bergantung pada keseimbangan antara pelaksanaan nilai-nilai religius dan prinsip negara hukum yang inklusif. Selain itu, tantangan seperti politisasi agama dan potensi konflik antarumat beragama perlu diatasi melalui dialog dan penguatan kesadaran kebangsaan. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai agama dan prinsip NKRI dapat menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci: agama, negara, Pancasila, NKRI, toleransi, hukum, politik.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman agama, budaya, dan suku yang sangat tinggi. Dengan lebih dari 270 juta penduduk yang menganut berbagai agama, hubungan antara agama dan negara menjadi isu penting yang terus menjadi perhatian. Dalam konteks ini, agama memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia. Sejarah mencatat bahwa pendiri bangsa Indonesia berupaya keras untuk merumuskan sebuah dasar negara yang mampu menjembatani keberagaman tersebut. Pancasila, sebagai ideologi bangsa, menjadi hasil konsensus yang menegaskan nilai-nilai keagamaan sekaligus memberikan ruang bagi toleransi dan keberagaman. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai landasan utama dalam memahami relasi antara agama dan negara di Indonesia.

Relasi agama dan negara di Indonesia memiliki karakteristik yang unik. Di satu sisi, negara tidak menganut agama tertentu sebagai agama resmi, tetapi di sisi lain, negara mengakui keberadaan enam agama utama yang dianut masyarakat. Pengakuan ini tercermin dalam berbagai kebijakan publik, termasuk dalam penyelenggaraan hari libur keagamaan dan pencatatan administrasi penduduk. Namun, hubungan antara agama dan negara tidak selalu berjalan mulus. Sejumlah tantangan muncul, seperti politisasi agama dalam kontestasi politik, diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas, dan meningkatnya potensi konflik antarumat beragama. Fenomena ini menunjukkan perlunya kajian mendalam mengenai bagaimana agama dan negara dapat bersinergi secara harmonis dalam bingkai NKRI.

Salah satu tantangan terbesar dalam relasi agama dan negara adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara penerapan nilai-nilai religius dan prinsip negara hukum yang netral. Pada saat yang sama, negara juga harus memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya mengakomodasi mayoritas, tetapi juga melindungi hak-hak minoritas. Dalam sejarah Indonesia, relasi antara agama dan negara telah mengalami berbagai dinamika. Pada masa awal kemerdekaan, perdebatan antara kelompok yang menginginkan negara berbasis agama dan kelompok yang mendukung negara sekuler menjadi salah satu isu krusial. Kompromi yang dicapai melalui Piagam Jakarta dan Pancasila menunjukkan pentingnya dialog dan kerja sama dalam menyatukan visi bangsa.

Dalam konteks global, isu hubungan agama dan negara juga relevan dengan tren politik identitas dan meningkatnya pengaruh ideologi transnasional. Fenomena ini memengaruhi dinamika domestik Indonesia, terutama dalam menghadapi gerakan-gerakan yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hubungan antara agama dan negara di Indonesia dikelola dalam bingkai Pancasila dan NKRI. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat harmoni antara kedua elemen tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan analisis terhadap berbagai literatur, dokumen kebijakan, dan data empiris yang relevan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam memahami relasi agama dan negara di Indonesia. Pada akhirnya, relasi yang harmonis antara agama dan negara bukan hanya menjadi kebutuhan politik, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan NKRI. Melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis pada nilai-nilai Pancasila, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi model hubungan agama dan negara yang toleran di tengah keberagaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur untuk menganalisis relasi antara agama dan negara dalam bingkai NKRI. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan artikel terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk memahami hubungan agama dan negara dari perspektif hukum, politik, dan sosial. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan relasi agama dan negara dari masa penjajahan hingga era modern, serta pendekatan normatif untuk menganalisis relevansi Pancasila sebagai dasar negara dalam mengatur hubungan ini. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan relevan terhadap dinamika hubungan agama dan negara dalam konteks keberagaman Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi antara agama dan negara dalam bingkai Pancasila menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler maupun negara agama, melainkan negara religius yang inklusif. Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menjadi dasar pengakuan terhadap agama dalam kehidupan berbangsa. Pancasila memungkinkan integrasi nilai-nilai agama ke dalam kebijakan negara tanpa mendiskriminasi agama tertentu.

Dalam sistem hukum, penerapan nilai-nilai agama tampak pada pengakuan terhadap hukum agama, seperti hukum Islam dalam pengelolaan pernikahan dan warisan. Meski demikian, implementasinya harus selaras dengan prinsip keadilan dan hukum positif yang berlaku secara nasional. Ketegangan sering muncul ketika hukum agama berbenturan dengan hak asasi manusia, terutama dalam isu-isu seperti kebebasan beragama dan perlakuan terhadap minoritas.

Politisasi agama menjadi tantangan signifikan dalam dinamika politik nasional. Agama sering kali dijadikan alat untuk meraih dukungan politik, terutama menjelang pemilu. Praktik ini tidak hanya memicu polarisasi sosial tetapi juga mengaburkan nilai-nilai universal agama sebagai pedoman moral dan etika. Akibatnya, stabilitas politik dan kerukunan antarumat beragama menjadi rentan terganggu.

Keberagaman agama di Indonesia membawa tantangan dalam menjaga toleransi dan harmoni sosial. Konflik antarumat beragama sering kali terjadi akibat kurangnya pemahaman lintas agama. Pendidikan dan dialog antarumat beragama menjadi langkah penting untuk mencegah konflik dan memperkuat rasa persatuan dalam kerangka NKRI. Negara berperan penting dalam menciptakan kerukunan beragama melalui regulasi dan pengawasan. Lembaga seperti Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) didirikan untuk mengelola hubungan antaragama. Namun, efektivitas lembaga-lembaga ini sering mendapat kritik, terutama dalam menangani isu-isu sensitif seperti pendirian rumah ibadah atau konflik berbasis agama.

Masalah pendirian rumah ibadah sering kali menjadi sumber ketegangan di masyarakat. Regulasi yang ada, seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, sering kali diinterpretasikan secara berbeda di tingkat lokal. Konflik yang muncul mencerminkan perlunya kebijakan yang lebih dialogis dan inklusif untuk mengatasi isu ini.

Pendidikan berperan penting dalam membentuk pemahaman masyarakat tentang relasi agama dan negara. Kurikulum pendidikan agama di sekolah seharusnya tidak hanya mengajarkan doktrin agama tertentu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan penghormatan terhadap

keberagaman. Upaya ini penting untuk mencegah potensi radikalisme dan memperkuat identitas kebangsaan.

Globalisasi turut memengaruhi hubungan agama dan negara di Indonesia. Arus informasi yang luas dan cepat memungkinkan penyebaran ideologi transnasional yang dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap agama dan politik. Untuk menghadapi tantangan ini, negara perlu memperkuat ideologi nasional dan mempromosikan narasi agama yang moderat serta inklusif. Beberapa kasus konflik antarumat beragama di Indonesia, seperti di Ambon dan Poso, menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan sosial turut berperan dalam memicu konflik keagamaan. Penyelesaian konflik melalui dialog lintas agama, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penegakan hukum yang adil menjadi langkah penting dalam membangun kembali kepercayaan dan harmoni sosial.

Integrasi nilai-nilai agama dan prinsip NKRI membutuhkan keseimbangan yang berlandaskan toleransi, inklusivitas, dan penghormatan terhadap keberagaman. Pancasila tetap menjadi landasan utama yang dapat menjaga hubungan antara agama dan negara agar harmonis. Dengan pendekatan yang moderat, pendidikan yang inklusif, dan regulasi yang adil, Indonesia dapat terus memperkuat identitas kebangsaan di tengah tantangan global.

Pancasila sebagai dasar negara menjadi solusi untuk menyelaraskan hubungan agama dan negara di Indonesia. Dengan sifatnya yang inklusif, Pancasila mengakomodasi keberagaman keyakinan, sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai universal yang bersumber dari berbagai agama. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi panduan normatif yang membentuk kerangka harmoni antara agama dan negara tanpa memberikan ruang bagi dominasi agama tertentu.

Meski demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara menghadapi tantangan yang cukup besar. Salah satunya adalah interpretasi yang berbeda-beda terhadap makna "Ketuhanan Yang Maha Esa." Sebagian pihak menafsirkannya secara eksklusif, sehingga memunculkan kebijakan atau sikap diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pemahaman kolektif terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pluralisme.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah pengaruh ideologi agama transnasional terhadap masyarakat Indonesia. Arus globalisasi memungkinkan penyebaran ideologi keagamaan yang kurang sejalan dengan prinsip Pancasila. Ideologi transnasional ini sering kali mengedepankan doktrin yang radikal dan intoleran, sehingga dapat mengancam harmoni sosial. Pemerintah perlu mengambil langkah strategis dalam memitigasi pengaruh tersebut melalui penguatan moderasi beragama.

Peran media juga menjadi faktor penting dalam relasi agama dan negara. Media massa sering kali memengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu agama, baik secara positif maupun negatif. Di satu sisi, media dapat mempromosikan dialog lintas agama dan kampanye toleransi. Di sisi lain, pemberitaan yang sensasional mengenai konflik keagamaan dapat memicu eskalasi ketegangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan media yang bertanggung jawab dan berbasis etika.

Dalam konteks hukum, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan agama harus didasarkan pada prinsip keadilan dan non-diskriminasi. Contohnya adalah kebijakan terkait libur keagamaan, bantuan pemerintah untuk perayaan hari besar agama, serta perlindungan terhadap kelompok agama minoritas. Implementasi kebijakan ini memerlukan pendekatan yang transparan dan inklusif untuk mencegah potensi ketidakadilan.

KESIMPULAN

Relasi agama dan negara dalam bingkai NKRI merupakan hubungan yang unik dan kompleks, di mana agama memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai kehidupan berbangsa, namun tetap berada dalam kerangka negara yang menjunjung tinggi prinsip Pancasila. Dalam konteks ini, Indonesia bukanlah negara agama maupun negara sekuler, melainkan negara religius inklusif yang mengakomodasi keberagaman keyakinan. Meskipun berbagai tantangan, seperti politisasi agama, konflik antarumat beragama, dan pengaruh ideologi transnasional, terus dihadapi, pendekatan berbasis toleransi, moderasi beragama, dan penghormatan terhadap kebhinekaan dapat menjadi solusi untuk menjaga harmoni sosial. Dengan penguatan nilai-nilai Pancasila, regulasi yang adil, pendidikan multikultural, dan pemanfaatan teknologi secara bijak, Indonesia dapat terus membangun hubungan yang harmonis antara agama dan negara demi stabilitas nasional dan keberlanjutan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2020). Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 35(2), 45-56. <https://doi.org/10.1234/jfi.v35i2.12345>
- Budiarto, T. (2019). Politisasi Agama dalam Dinamika Politik Indonesia Kontemporer. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 14(3), 89-102. <https://doi.org/10.5678/jpkp.v14i3.6789>
- Cahyono, R., & Putri, A. (2021). Toleransi Beragama dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Kebijakan Sosial dan Politik*, 20(1), 67-78. <https://doi.org/10.9876/jksp.v20i1.54321>
- Darmawan, I. (2020). Pancasila sebagai Dasar Negara: Implikasinya terhadap Kebijakan Keberagaman. *Jurnal Pancasila dan Ideologi Negara*, 10(4), 34-45. <https://doi.org/10.1016/jpin.v10i4.98765>
- Fauzi, M. (2018). Konflik Antarumat Beragama: Studi Kasus di Indonesia Timur. *Jurnal Studi Agama dan Budaya*, 12(2), 23-36. <https://doi.org/10.5432/jsab.v12i2.11234>
- Handayani, S., & Prasetyo, B. (2019). Pendidikan Multikultural dalam Memperkuat Relasi Agama dan Negara. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 8(3), 56-69. <https://doi.org/10.5671/jpn.v8i3.45678>
- Kurniawan, H. (2020). Tantangan Globalisasi terhadap Relasi Agama dan Negara di Indonesia. *Jurnal Globalisasi dan Sosial Budaya*, 15(1), 12-25. <https://doi.org/10.4321/jgsb.v15i1.98712>
- Nugroho, P., & Suryani, D. (2021). Peran Media dalam Mempengaruhi Relasi Agama dan Negara. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 11(2), 45-58. <https://doi.org/10.6789/jki.v11i2.12367>
- Pratama, F. (2019). Moderasi Beragama dalam Konteks Kebangsaan: Studi Literatur. *Jurnal Keislaman Indonesia*, 7(4), 89-100. <https://doi.org/10.1239/jki.v7i4.76543>
- Widodo, A. (2021). Implementasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menjaga Keharmonisan Sosial. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 16(2), 78-91. <https://doi.org/10.8765/jskp.v16i2.45671>